

SEBERAPA DEKAT GEOGRAFI DENGAN PEMBANGUNAN?

Oleh : Novirene Tania*

Divisi Riset dan Keilmuwan

Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan (HMGP) UGM

**corresponding author*: novirenetania@mail.ugm.ac.id


Jika kita berbicara tentang pembangunan, apakah yang pertama kali terpikir? Infrastruktur yang baik, pendidikan yang merata, pelayanan kesehatan yang memadai, atau pemberantasan habis angka pengangguran di tanah air? Ya, kesemua hal itu adalah bagian dari pembangunan dan masih banyak lagi elemen pendukungnya. *Jadi, sebenarnya, apakah itu pembangunan?*

Secara substansif, pembangunan bisa dilihat dan ditanggapi dari berbagai sisi. Seperti halnya pembangunan yang berada dalam kerangka ide pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), didalamnya memuat berbagai hal yang pada dasarnya adalah mengintegrasikan strategi pengejaran pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan secara ekologi (Baiquni, 2004). Dua elemen inilah – ekonomi dan ekologi – yang pada umumnya seringkali dikatakan bagai dua mata pisau yang saling bertolak belakang menjadi tantangan bagi tiap negara dalam mewujudkan pembangunannya. Berdasarkan pada pemahaman ini, maka pembangunan setidaknya membahas tentang beberapa hal yang fundamental yaitu (1) upaya pemenuhan kebutuhan manusia yang ditopang dengan kemampuan ekosistem, (2) upaya peningkatan mutu kehidupan manusia dengan melindungi dan memberlanjutkan, (3) upaya peningkatan SDM dan SDA yang dibutuhkan pada waktu yang akan datang, dan (4) upaya mempertemukan kebutuhan manusia secara antargenerasi (Baiquni, 2004).

Pembangunan dengan kompleksitasnya membutuhkan berbagai disiplin ilmu yang mampu menunjang keberhasilan dari berbagai sektor, Dalam hal inilah, Geografi sebagai ilmu yang komprehensif menjadi penting keberadaannya. Geografi yang pada dasarnya

berbicara tentang ‘ruang’ sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (UU No 26 Tahun 2007) menjadi dasar awal pembangunan itu berlangsung. Selain itu, pembeda Geografi dari ilmu lainnya dalam pendekatan yang digunakan berperan penting dalam konteks pembangunan itu sendiri.

Pendekatan yang berupa **pendekatan keruangan** (*spatial approach*) di dalamnya menitikberatkan pada tiga unsur penting yaitu jarak (*distance*), interaksi (*interaction*), dan pergerakan (*movement*) (Bintarto dan Surastopo, 1979 dalam Muhyidin, 2009). Ilustrasi mudah untuk menggambarkan pentingnya pendekatan keruangan dalam pembangunan adalah berkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pemindahan IKN sebagai suatu upaya yang berdampak pada arah pembangunan negara tentu melibatkan berbagai syarat dalam penentuan wilayah sasaran. Tiga unsur tersebut tentu menjadi pertimbangan mendasar dalam menentukan kemana pusat pemerintahan akan dipindahkan. Melalui dialog nasional pemindahan IKN yang mengangkat tema “**Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable**” (Bappenas, 15/07/2019), Kalimantan menjadi wilayah sasaran pemindahan dengan didasarkan pada kriteria penentuan lokasi berupa lokasi strategis yang berada di tengah wilayah Indonesia (di dalamnya memuat unsur jarak), dekat dengan kota *existing* yang sudah berkembang sehingga efisien untuk investasi awal infrastruktur (di dalamnya memuat unsur interaksi), dan ketersediaan akses mobilitas seperti bandara, pelabuhan, jalan, bahkan tol laut (di dalamnya memuat unsur pergerakan) (gambar 1). *Sudahkah cukup terbayang bagaimana pertimbangan Geografi berperan dalam pemilihan wilayah sasaran pemindahan ibu kota?*



Republik Indonesia

Kriteria Penentuan Lokasi Ibu Kota Negara



Kementerian PPN/
Bappenas



Lokasi Strategis yang berada di tengah wilayah Indonesia (Indonesia Centris).



Lokasi aman dan bebas terhadap Risiko Bencana gempa bumi, gunung berapi dan tsunami

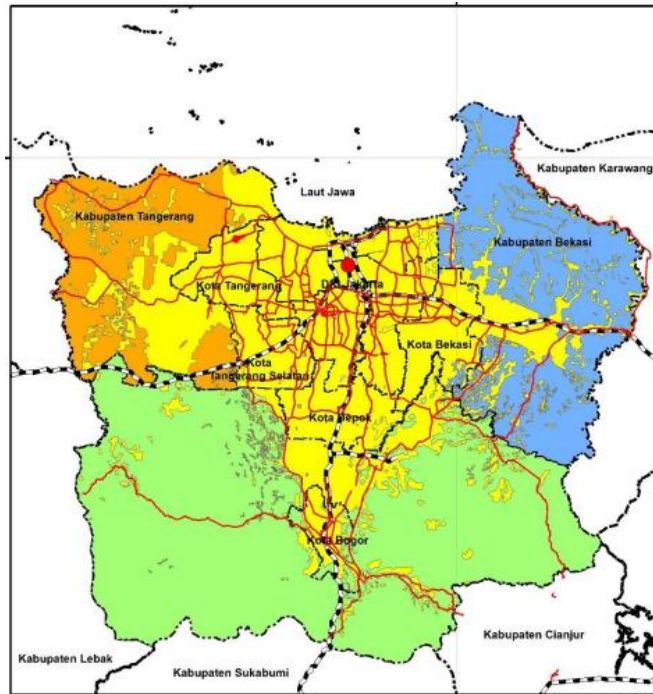
- ❑ **Lokasi Strategis**, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pengembangan wilayah KTI (**Indonesia Centris**).
- ❑ **Tersedia lahan luas** milik pemerintah/BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi.
- ❑ Lahan harus **bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut**
- ❑ **Tersedia sumber daya air** yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan
- ❑ **Dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang** untuk efisiensi investasi awal infrastruktur.
 - ✓ Akses mobilitas/logistik : bandara, pelabuhan dan jalan.
 - ✓ Ketersediaan pelabuhan laut dalam sangat penting untuk mewujudkan **Indonesia sebagai negara maritim** melalui konektivitas tol laut antar pulau.
 - ✓ Tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan
- ❑ **Potensi konflik sosial** rendah dan memiliki **budaya terbuka terhadap pendatang**, serta memiliki dampak negatif minimal terhadap komunitas lokal.
- ❑ Memenuhi **perimeter pertahanan dan keamanan**, terutama (a) *to minimize vulnerability of State*; (b) *Safeguard its territorial*; (c) *help to gain Regional and International Affairs*; (d) Tidak dekat wilayah perbatasan negara.

Gambar 1. Kriteria Penentuan Lokasi Ibu Kota Negara
(mengandung konsep fundamental ilmu Geografi)

Sumber: Bappenas, 2019

Pendekatan lainnya adalah **pendekatan kelingkungan (*ecological approach*)**. Sesuai dengan namanya, maka pendekatan ini berhubungan dengan keterkaitan manusia dengan lingkungannya. Pendekatan ini juga mencakup bagaimana manusia melakukan sejumlah upaya preventif terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan. Guna memudahkan pemahaman, peningkatan titik api atau hotspot di sejumlah provinsi yang terdampak kebakaran lahan dan hutan dapat dijadikan contoh untuk melihat bagaimana manusia yang dalam hal ini pihak berperan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupaya mengurangi titik hotspot di beberapa daerah (Kompas, 30/07/2019). Penjabaran dari Menteri KLHK, Siti Nurbaya, menyebutkan bahwa pemerintah telah melakukan banyak langkah dan terus berfokus pada pencegahan sehingga optimis dapat mengatasi kemunculan titik hotspot yang berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi, memburuknya kesehatan anak hingga pada hilangnya keanekaragaman hayati (Kalimantan-news, 24/07/2019). Kaitannya dengan fenomena tersebut, Geografi berperan baik dari identifikasi permasalahan, analisis dampak, serta merumuskan solusi dan penanganan yang layak. Berbasis pada pendekatan kelingkungan inilah, maka tindakan yang diambil dapat lebih terarah dan tepat sasaran dengan memperhatikan ciri dan karakteristik masing-masing wilayah.

Pendekatan keruangan dan kelingkungan dapat dikombinasikan dalam menangani berbagai fenomena yang ada di permukaan bumi. Kombinasi tersebut didekatkan dengan konsep perbedaan wilayah atau biasa dikenal **pendekatan kompleks kewilayahan** (Bintarto dan Surastopo, 1979 dalam Muhyidin, 2009). Kompleksitas yang dimaksudkan dalam pendekatan ini mengarah pada perbedaan karakteristik wilayah yang mengakibatkan adanya perbedaan potensi sumberdaya yang dimiliki wilayah tersebut (Nurana, 2012). Perbedaan sumberdaya akan mendorong antarwilayah melakukan interaksi keruangan yang didalamnya mencakup pergerakan barang, migran, uang, penumpang, informasi, gagasan atau yang lainnya (Hillman dalam Muhyidin, 2009). Dalam aplikasinya, pendekatan kompleks kewilayahan dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami interaksi keruangan yang terjadi dalam pertumbuhan beberapa kawasan metropolitan Indonesia, salah satunya adalah Jabodetabek. Tingginya aktivitas di pusat pertumbuhan (DKI Jakarta) menyebabkan pengaruh tersebut meluas ke wilayah di sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Perluasan pengaruh yang bersifat positif maupun negatif telah membentuk kompleksitas tersendiri yang saling berhubungan di dalam struktur keruangan Jabodetabek. Perbedaan karakteristik antarwilayah di Jabodetabek menyebabkan interaksi keruangan terjadi dalam hubungan saling melengkapi sumberdaya (*regional complementary*), kesempatan mengintervensi (*intervening opportunity*), dan kemudahan transfer pemindahan dalam ruang (*spatial transfer ability*) sehingga membentuk struktur keruangan tersendiri. Struktur keruangan Jabodetabek yang menunjukkan pola polisentris terus menerus berlangsung sehingga fenomena *urban sprawl* (perembetan sifat fisik kota dari pusat ke daerah sekitarnya) terus memberi dampak dan kecenderungan dalam berbagai aspek (gambar 2).



Gambar 2. Pola *Urban Sprawl* Kawasan Jabodetabek

Sumber: Peta RBI Bakosurtanal Tahun 2002 dalam Fitriani dkk (2018)

Setelah membaca beberapa fenomena dalam proses pembangunan di Indonesia seperti di atas, sudahkah jelas seberapa dekat peran Geografi di dalamnya?

“Geography is concerned with man as well as with the earth and with the relationships and analysis as well as with description”

(Murphey)

Sumber Referensi

- Baiquni, M 2004, Membangun Pusat-Pusat di Pinggiran, Yogyakarta, kerjasama ideAS (*Institute for Development and Environment Studies*) dan PKPEK (Perkumpulan untuk Kajian dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan)
- Bappenas, 2019, *Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara: Bappenas Diskusikan Kesiapan Kalimantan Selatan untuk Menjadi Ibu Kota Baru*, <http://bappenas.go.id>, diakses tanggal 9 Agustus 2019 pukul 22.00 WIB
- Fitriani, I., Juhadi., Indrayati, A 2018, Fenomena Urban Sprawl Jabodetabek, *Edu Geography*, 6(1), Semarang, Universitas Negeri Semarang
- Kalimantan-News, 2019, *Dampak Karhutla Hambat Kecerdasan dan Pertumbuhan Anak*, <http://kalimantan-news.com>, diakses tanggal 9 Agustus pukul 20.26 WIB
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2019, *Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara*, Dialog Nasional II: Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, and Beautiful.
- Kompas, 2019, *Menteri LHK: Titik Api Karhutla Terus Bertambah*, <http://regional-kompas.com/>, diakses tanggal 9 Agustus 2019 pukul 20.27 WIB
- Muhyidin, M 2009, Analisis Keruangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo Kota Surakarta, *Skripsi*, Yogyakarta, Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nurana, A 2012, Analisis Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Ketimpangan Perkembangan Wilayah Di Kawasan Ciayumajakuning, *Jurnal Bumi Indonesia*, vol 1 no 3
- Sumaatmadja, N 1988, *Geografi Pembangunan*, Jakarta, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, *Penataan Ruang*, Jakarta